



# LEMHANNAS RI

## NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi III 20 Oktober 2009

### SEMINAR NASIONAL URGENSI PEMEKARAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH, foto bersama dengan para pembicara pada acara Seminar Nasional di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI

#### DAFTAR ISI

1	Seminar Nasional Urgensi Pemekaran Daerah .....	1
2	Apa dan Siapa Dewan Pengarah Lemhannas RI .....	2
3	Kepemimpinan untuk Asean baru di abad ke-21 ....	4
4	Kunjungan National Defense University (NDU) Republik Korea .....	5
5	Kunjungan Duta Besar Republik Serbia.....	5
6	Prioritas Kegiatan Debid Taplai Kebangsaan tahun 2009 .....	6
7	Pengembangan Sistem Evaluasi Elektronik .....	6
8	Kunjungan Deputy Director of Thailand's NCC - CTTC .....	7
9	Penjajakan Kerjasama Lemhannas RI - STIA LAN RI.....	7
10	Halal Bi Halal Lemhannas RI .....	8
11	Inspeksi mendadak (Sidak).....	8
12	Study Strategis luar Negeri PPRa XLIII .....	9
13	Kegiatan Inspektorat .....	9
14	Sertijab dan Pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV Lemhannas RI .....	10

Dalam seminar nasional Lemhannas RI dengan Tema Urgensi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat tanggal 29 September 2009 di Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH menyampaikan bahwa dalam proses demokratisasi yang terus berlanjut, dimana salah satu nilai dasarnya yang disepakati adalah pelaksanaan Otonomi Daerah, pemekaran daerah mendapat prioritas untuk dikaji, karena satu sisi memiliki nilai-nilai strategis sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi disisi lain memunculkan berbagai permasalahan karena persepsi yang bersifat parsial dan belum komprehensif dalam menginterpretasikan perundang-undangan sehingga tidak diperoleh gambaran yang lengkap tentang substansi pemekaran daerah. Hal ini tentu saja berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan, sehingga kebijakan desentralisasi merupakan pilihan tepat sebagai salah satu manifestasi untuk pembentukan daerah otonom.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, agar daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, ke khususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam NKRI.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini pemekaran dan pembentukan daerah otonomi baru terus terjadi. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah otonomi baru yang terdiri dari : 7 Provinsi ; 164 Kabupaten dan 34 Kota. Dengan demikian jumlah daerah otonom yang ada hingga saat ini adalah 524 daerah, yang terdiri dari: 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota.

Secara linier dengan asumsi tipologi bentang alam (*Landscape*) agraris dan prediksi pertumbuhan penduduk, maka dengan wilayah geografis yang sangat luas, apabila hanya berdasarkan analisis daya dukung wilayah (*Carrying Capacity*) tanpa melihat kesiapan daerah yang dimekarkan, Indonesia masih berpeluang untuk tumbuhnya daerah otonom baru. Demikian pula pengaruh demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah

memberi konsekuensi bagi proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejak reformasi, fenomena pemekaran daerah muncul ditengah-tengah masyarakat seakan-akan tanpa kendali, sehingga terkesan sebagai proses pembelahan wilayah secara mudah yang telah memberikan kesan lebih banyak kepada kepentingan elit politik, sehingga mengabaikan persyaratan yang rasional dan konstruktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan otonomi daerah mengalami kesulitan untuk mengendalikan laju pertumbuhan pemekaran daerah karena belum memiliki semacam *Grand Design* tentang berapa jumlah ideal daerah otonom di Indonesia dan berbagai kendala dalam menerapkan evaluasi pemekaran daerah, atas dasar parameter yang terukur. Sementara pada saat yang sama sejumlah proposal baru tentang pemekaran daerah sedang dibahas oleh Legislatif.

Lemhannas baik sebagai Lembaga pendidikan kepemimpinan nasional maupun sebagai pusat kajian strategis dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan selalu *concerned* atau peduli terhadap pelbagai index internasional, yang dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri. Dua index internasional yang sedikit banyak terkait dengan tema seminar sebagai renungan bersama adalah :

1. Index demokrasi (*Democracy Index*) dari *The Economist intelligence unit index* yang mengkaji kondisi dari 167 negara atas dasar pelbagai parameter, yang salah satunya adalah *Functioning of Government*. Dari 4 katagori yang dikelompokkan, yaitu *Full Democracy, Flawed Democracy, Hybrid Regimes* dan *Authoritarian Regimes*. Tahun 2008 bersama-sama dengan 53 negara lain Indonesia masih masuk dalam kategori *Flawed Democracy*.

2. Index Negara gagal (*Failed states Index*) dari *The fund for peace and the magazine foreign policy*, yang salah satu indikatornya adalah *Progressive Deterioration of Public Service*, menghasilkan empat Kategori, yaitu Kategori *Alert, Warning, Moderate, and Sustainable*. Tahun 2008 dari 177 negara, Indonesia masih masuk kategori *Warning* bersama-sama dengan 93 negara yang lain.

# APA DAN SIAPA DEWAN PENGARAH LEMHANNAS RI?



*Dewan Pengarah Lemhannas RI dan para Pejabat Struktural membahas Program Kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 6 Oktober 2009 di Ruang Rapat Dewan Pengarah*

**P**eraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006, tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, di jelaskan pada bagian ke tiga, yaitu tentang Dewan Pengarah Lemhannas RI. Merupakan suatu *challenges* atau tantangan bagi Lemhannas RI untuk meningkatkan postur dan peran dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan menghadapi Globalisasi serta lingkungan strategis lainnya.

Menurut Sekertaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, perubahan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia (Lemhannas RI), maka pada periode tersebut, otoritas sepenuhnya

berada pada Gubernur Lemhannas RI. Dewan Pengarah Lemhannas RI adalah dewan yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Lemhannas RI. Bila di dibandingkan dengan organisasi pada perguruan Tinggi Negeri maka setara dengan Majelis Wali Amanah dan bila pada perusahaan swasta setara dengan Dewan komisaris. Selanjutnya dijelaskan khusus Dewan Pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan umum Lemhannas RI, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan umum di bidang: pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional; pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan

internasional; pemantapan nilai-nilai kebangsaan; kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang studi strategis ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/ atau internasional; serta kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam kepengurusannya terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota dengan pimpinannya merupakan kepemimpinan kolektif yang terdiri dari seorang Koordinator merangkap Anggota yang langsung dijabat oleh Gubernur Lemhannas RI, dan seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang sebagai anggota.

Penjelasan lengkap tentang organisasi Dewan Pengarah pada edisi ini susunan anggota tidak lagi diuraikan secara rinci karena sudah dijelaskan dalam News Letter edisi terdahulu (edisi kedua).

Apabila Koordinator Dewan Pengarah berhalangan tugas, maka dapat diwakilkan kepada salah seorang anggota yang dipilih oleh anggota. Dewan Pengarah dalam menjalankan program dan kegiatan di dukung dan difasilitasi oleh Sektama Lemhannas RI. Penentuan kriteria Anggota Dewan Pengarah sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 dapat berasal dari kalangan birokrat, teknokrat, pakar/professional, dan/atau tokoh masyarakat. Para calon anggota Dewan Pengarah diusulkan kepada Presiden oleh Gubernur Lemhannas RI paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota Dewan Pengarah dan kepengurusan anggota Dewan Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengarah berupa: Rapat Pleno yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Keputusan Dewan Pengarah diambil dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Koordinator Dewan Pengarah dan dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota.

Macam penyelenggaraan rapat-rapat pleno Dewan Pengarah berupa: 1. Rapat Pleno Triwulan untuk merumuskan dan menetapkan fungsi perumusan kebijaksanaan umum Lemhannas RI sesuai tugas dan fungsi Dewan Pengarah Lemhannas RI, 2. Rapat Pleno Khusus untuk memutuskan suatu kebijakan atas

dasar adanya penugasan khusus dari Presiden RI, perkembangan lingkungan strategik yang sangat berpengaruh pada kepentingan nasional dan lokal, serta pengaruh kawasan dan global terhadap kepentingan nasional.

#### **Metoda dalam pelaksanaan:**

1. Rapat Pleno Triwulan dilakukan sesuai kegiatan pokok, antara lain:
  - a. Rapat/diskusi permasalahan internal dengan tujuan untuk memformulasikan perumusan Kebijaksanaan umum Lemhannas RI, pembahasan dan penyusunan kegiatan kunjungan kerja, pembahasan dan penyusunan salah satu fungsi Dewan Pengarah Lemhannas RI, dengan mengikut sertakan para pejabat selektif Struktural dan fungsional Lemhannas RI dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengarah Lemhannas RI.
  - b. Rapat/Diskusi Eksternal Dewan Pengarah Lemhannas RI adalah untuk memformulasikan perumusan kebijaksanaan umum Lemhannas RI, pembahasan dan penyusunan kegiatan kunjungan kerja, pembahasan Lemhannas RI dengan mengikut sertakan para pejabat selektif Struktural dan fungsional Lemhannas RI
2. Rapat Pleno Khusus diselenggarakan melalui Rapat /Diskusi Khusus dengan tujuan agar setiap permasalahan strategis yang berkait dengan kebijaksanaan umum Dewan Pengarah Lemhannas RI dapat terselesaikan secara professional, proporsional, dan adil.

Dari kedua metode rapat diatas dilaksanakan secara komprehensif, integral dan holistic dengan mengedepankan skala prioritas.

Program dan kegiatan Asistensi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi oleh Dewan Pengarah Lemhannas RI, dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keadaan kondusif yang professional, proporsional, bersih dan akuntabel serta berpedoman pada tepat alamat, tepat waktu, dan tepat sasaran pada program kegiatan yang berlaku di lingkungan Lemhannas RI dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengarah Lemhannas RI. Metoda pelaksanaan dalam kegiatan *Asistensi*, koordinasi, Monitoring dan *Evaluasi* dilaksanakan secara komprehensif, integral dan holistik terhadap fungsi Dewan Pengarah, dan di atur dalam 2 (dua) macam Kegiatan meliputi *Asistensi* dan *Evaluasi*. Khusus para Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional dengan nama kegiatan *Intellectual Exercise* serta kegiatan perorangan anggota Dewan Pengarah meliputi Koordinasi dan Monitor terhadap pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik berbagai permasalahan nasional dan internasional, pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, kerja sama pendidikan pasca sarjana dibidang studi strategis ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan tingkat nasional dan/ atau internasional serta kerja sama pengkajian strategis dan kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

# KEPEMIMPINAN UNTUK ASEAN BARU DI ABAD KE- 21



Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi SH sedang memimpin Seminar Kepemimpinan untuk ASEAN Baru di abad ke-21 pada tanggal 31 September 2009

mengelola kerja ASEAN; **Kedua**, Para Duta Besar ASEAN Dialog, fasilitas untuk Mitra dan negara-negara sahabat guna mempromosikan keterlibatan yang lebih dekat dengan Masyarakat Internasional; **Ketiga**, Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa aturan berbasis Komunitas ASEAN; **Keempat**, Pengaturan ASEAN Inter Governmental Komisi Hak Asasi Manusia pada akhir tahun, dan Persetujuan ASEAN tentang Hak Istimewa dan Kekebalan untuk memfasilitasi bisnis ASEAN oleh para pejabat dan orang lain.

Dijelaskan juga bahwa sejarah menunjukkan kepemimpinan ASEAN tidak hanya terbatas pada modus kepemimpinan saja tetapi campuran sifat, gaya, kontingensi, transformasi, dan pendekatan beraneka segi kepemimpinan tergantung pada masalah, negara, dan kepribadian yang terlibat.

Ke depan, ASEAN Charter dan Roadmap menuju Komunitas ASEAN 2015 berisi Blueprints Masyarakat ASEAN serta Rencana Kerja Kedua dari Inisiatif Integrasi ASEAN yang memberikan arah dan upaya pembangunan komunitas ASEAN. Piagam prinsip-prinsip, norma-norma dan tujuan ASEAN, akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk saat ini dan masa depan bagi para pemimpin ASEAN di setiap tingkatan dan sektor, guna membentuk kebijakan ASEAN.

**S**ekjen Asean dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. DR. Muladi, SH atas undangan diskusi dan ucapan selamat dengan diterbitkannya Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) yang akan berfungsi sebagai "GUIDEPOST" dalam menilai tingkatan kepemimpinan di semua sektor di Indonesia.

Menurut H.E. Pushpanathan, Wakil Sekjen ASEAN, menyampaikan bahwa sejak berdirinya ASEAN pada bulan Agustus 1967, untuk mengubah Regional dan Global Setting telah melalui perubahan transformatif. Dunia telah menjadi lebih kecil dengan munculnya teknologi tinggi, teknologi

komunikasi informasi dan pergerakan manusia. Pada saat yang sama, masalah-masalah yang dihadapi dunia dan multifaset transnasional memerlukan kerjasama dari semua negara untuk menanganinya secara efektif, termasuk keuangan global saat ini dan krisis ekonomi, proliferasi nuklir, terorisme, kejahatan transnasional lainnya, perubahan iklim, ketahanan pangan, masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Guna melaksanakan hal tersebut, ditetapkan empat dewan menteri untuk mendorong pembangunan masyarakat ASEAN: **Pertama**, Komite Perwakilan Tetap ASEAN yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan

## KUNJUNGAN NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY (NDU) REPUBLIK KOREA DI LEMHANNAS RI



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH photo bersama dengan pimpinan Rombongan Prof. Sang Yeong Choi dan perwakilan National Defence University Republic Korea di Ruang Kerja Gubernur Lemhannas RI

**K**unjungan tamu *National Defense University* (NDU) Republik Korea beserta rombongan pada tanggal 14 Oktober 2009 diawali dengan *Courtesy Call* kepada Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH dengan didampingi Mayjen TNI Bibit Santoso, S.IP, MH. Dalam pertemuan tersebut pimpinan rombongan Prof. Choi Sung Yeong menyampaikan tujuan rombongan yang dilakukan lebih kurang lima belas menit. Acara dilanjutkan tukar menukar cinderamata dan foto bersama.

Rombongan dan staf Lemhannas RI melanjutkan diskusi yang dipimpin oleh Mayjen TNI Bibit Santoso, S.IP, MH, di ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra, dengan topic permasalahan tentang "CURRENT ISSUE" saat ini. Sebelum diskusi berlanjut, terlebih dahulu dijelaskan tentang Profil Lemhannas RI mengawali dari acara pertemuan tersebut dan dilanjutkan diskusi yang banyak berkaitan dengan bidang pengkajian internasional, juga tentang pendidikan yang dilaksanakan di Lemhannas RI.

## KUNJUNGAN DUTA BESAR REPUBLIK SERBIA DI LEMHANNAS RI

**G**ubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Serbia Zoran Kazazovic di Ruang Kerja Gubernur tanggal 19 Oktober 2009.

Pada pertemuan selama 30 menit yang berlangsung sangat akrab tersebut, Duta Besar Republik Serbia menyampaikan keinginan untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan Indonesia antara lain dengan Lemhannas RI.



Suasana pertemuan di ruang kerja Gubernur Lemhannas RI dengan Dubes Republik Serbia



Gubernur Lemhannas RI menyambut kedatangan Dubes Republik Serbia Zoran Kazazovic dalam rangka Kunjungan ke Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI didampingi Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Karo Humas Brigadir Jenderal TNI Kusworo, dan Karo Kerma Brigadir Jenderal TNI Puspo Djoko Purwanto, S.IP. menyambut hangat Kunjungan Kehormatan dan keinginan tersebut, berharap kerjasama dan hubungan baik yang selama ini terjalin dapat terpelihara dan terus ditingkatkan.

## PRIORITAS KEGIATAN DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN (DEBID TAPLAI) TAHUN 2010

**D**ebid Taplai Kebangsaan Lemhannas RI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep di bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Pasal 225 Per Gub Nomor. 1/2006).

Dalam usulan tahun 2010-2014, Program Kegiatan Debid Taplai Kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemantapan Substansi Nilai-nilai Kebangsaan.
2. Program Pembulatan Nilai-nilai Kebangsaan.
3. Program Implementasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.
4. Program Pengembangan Dukungan Fasilitas.
5. Program Pengembangan Sumber Daya.

### OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Merujuk pada Paradigma Pembangunan Nasional nomor enam yang diwacanakan oleh Presiden SBY dimana strategi pembangunan menitikberatkan pada kemajuan kualitas sumber daya manusia, maka Debid Taplai Kebangsaan dengan acuan tersebut berupaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI ELEKTRONIK (E - EVALUATION)



*Proses belajar mengajar anggota Lemhannas RI, tentang pengembangan Sistem Evaluasi Elektronik (E-Evaluation) Bagian Biro Telematika Setrama Lemhannas RI*

**P**eranan teknologi ICT saat ini telah berkembang dengan pesat, yang semakin memberikan dampak positif terhadap hasil pekerjaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Begitu pula dengan perkembangan teknologi informasi yang mengalami banyak kemajuan dalam membantu seseorang untuk lebih cepat mengakses maupun dalam memberi atau menerima informasi melalui penggunaan komputer.

Berkaitan dengan bidang ICT, maka pada Edisi ke-3 Oktober 2009 ini, redaksi News Letter Lemhannas RI menyampaikan informasi tentang Pengembangan Sistem Evaluasi Elektronik (E - Evaluation) di Lingkungan Lemhannas RI.

Sebagaimana kita ketahui, teknologi ICT dengan Sistem Informasinya merupakan sarana atau alat yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok, bagi institusi pemerintah maupun swasta, dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas. Untuk itulah dalam rangka penerapan Good Governance, Lemhannas RI pada saat ini sedang mengembangkan Evaluation Electronic System (E - Evaluation) di lingkungannya guna menghasilkan kecepatan dan keakuratan informasi, serta transparansi dalam berbagai bidang sesuai fungsi dan tugas pokok Kesektamaan dan Kedeputusan. Penerapan E - Elektronik tersebut diawali dalam bidang pendidikan, seperti pada Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA).

Pengembangan E - Elektronik (E-Evaluation) di lingkungan Lemhannas RI diharapkan dapat

membantu dan lebih mempermudah SDM dalam melaksanakan evaluasi di bidang pendidikan sehingga memperoleh hasil maksimal.

Pengembangan E - Evaluation tersebut, diharapkan akan menghasilkan:

1. Sistem Evaluasi Elektronik yang dapat mendukung proses evaluasi program pendidikan secara cepat, akurat, dan transparan;
2. Tenaga operator terlatih untuk mengoperasikan Sistem Evaluasi Elektronik;
3. Sistem Evaluasi Elektronik ke para pengguna computer agar tersosialisasi secara baik.

Begitu pula dengan E - Evaluation diharapkan dapat menambah peningkatan kualitas para Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI, seperti:

1. Manajer Proyek Implementasi Sistem Informasi;
2. Ahli Manajemen Informasi;
3. Sistem Analis;
4. Database Designer dan Database Administrator;
5. Programmer.

Manfaat bagi Peserta PPSA dan PPRA antara lain sebagai berikut:

1. Secara cepat mendapatkan data nilai-nilai hasil evaluasi;
2. Secara transparan mengetahui nilai-nilai yang diperoleh;
3. Dapat mengakses data nilai-nilai evaluasi, kapan saja dan dari mana saja;
4. Dapat memperoleh informasi lainnya, misalnya jadwal kelas, jadwal tutorial, jadwal kegiatan utama, dan lain-lain.

Manfaat lainnya pengembangan E - Evaluation antara lain: Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas institusi.

## KUNJUNGAN DEPUTY DIRECTOR OF THAILAND'S NCC-CTTC

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Lemhannas RI menerima kunjungan tamu dari *Deputy Director of Thailand's National Coordinating Centre for Combating Terrorism and Transnational Crime (NCC-CTTC)* beserta rombongan.

Acara diawali pada pukul 10.00 s.d 10.15 WIB, *Deputy Director of Thailand's National Coordinating Centre for Combating Terrorism and Transnational Crime (NCC-CTTC)* melaksanakan *Courtesy Call* kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI (mewakili Gubernur) yang didampingi oleh Marsda TNI Surya Dharma, S.IP beserta staf, bertempat di ruang Wakil Gubernur. Pada kesempatan itu pimpinan rombongan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Lemhannas RI kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh 7 (tujuh) pejabat Lemhannas RI dan 5 (lima) dari perwakilan peserta PPRA XLIII yang dipimpin oleh Marsda TNI Surya Dharma, S. IP, bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra dengan topik *Indonesia's Policy on Terrorism and Transnational Crime*. Selanjutnya rombongan meninggalkan Lemhannas RI pada pukul 11.30 WIB.



Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI DR Rio Mendung Thalieb, sedang menyerahkan Plaguet kepada Deputy Director of Thailand's NCC-CTTC Lt. Gen. Suravach di ruang kerja Wagub Lemhannas RI, tanggal 1 Oktober 2009



Marsda TNI Surya Dharma memimpin diskusi dengan Deputy Director of Thailand's NCC-CTTC Lt. Gen. Suravach Butrwong di ruang Rapat Nusantara I gedung Tri Gatra Lemhannas RI

## PENJAJAKAN KERJA SAMA LEMHANNAS RI - STIA LAN RI



Sektama Lemhannas RI, DR. Ardi Partadinata, MH, MSi, sedang menjelaskan tentang Profile Lemhannas RI

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 pukul 14.30, Sekretaris Utama Lemhannas RI menerima kunjungan balasan ketua STIA LAN dalam rangka penajakan kerja sama antara Lemhannas RI dengan STIA-LAN, bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Sekretaris Utama Lemhannas RI didampingi oleh para Kepala Biro jajaran Settama dan dari pihak STIA LAN dipimpin oleh Ketua STIA LAN, Prof. DR. J. Basuki, MPSi yang didampingi oleh 4 (empat) pejabat STIA LAN. Pada kesempatan itu dilakukan saling tukar menukar informasi bidang pendidikan, penjelasan Misi, visi dan organisasi dari kedua institusi. Kegiatan di akhiri dengan peninjauan beberapa fasilitas sarana pendidikan di Lemhannas RI.

## INSPEKSI MENDADAK (SIDAK) GUBERNUR LEMHANNAS RI

**S**alah satu kegiatan dalam rangka penerapan Good Governance dilingkungan Lemhannas RI adalah disiplin pegawai guna meningkatkan Penyelenggaraan Negara, sebagaimana dijabarkan dalam Buku IKNI yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI dengan judul "Peningkatan Sistem Kepemimpinan Nasional Guna Mendukung Penyelenggaraan Negara Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Nasional". Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH didampingi oleh Sektama Lemhannas RI, DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si. pada hari pertama masuk kerja tanggal 24 September 2009, melaksanakan inspeksi mendadak kesetiap unit kerja Lemhannas RI, setelah libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1430 H tanggal 18 s.d. 23 September 2009.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur untuk bersilaturahmi langsung dengan anggota, melihat kegiatan rutin kerja, sekaligus melakukan pengecekan langsung kehadiran anggota di tiap-tiap unit kerja. Kehadiran anggota pada hari pertama masuk kerja sebesar 95%, sisanya yang tidak hadir antara lain karena kesulitan transportasi dan sakit. Disamping mengadakan peninjauan ke setiap unit kerja, Gubernur Lemhannas RI juga melakukan pengecekan kebersihan dan keamanan lingkungan disekitar lembaga.



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH, bersilaturahmi dengan salah satu staf Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan pada kesempatan Sidak Gubernur di hari pertama masuk kerja tanggal 24 September 2009 setelah libur Nasional hari Raya Idul Fitri 1430 H

## ACARA HALAL BI HALAL DI LEMHANNAS RI TANGGAL 29 SEPTEMBER 2009



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi SH, di dampingi Ketua Dharma Wanita beserta pengurus Dharma Wanita Lemhannas RI melaksanakan Halal bi Halal dengan seluruh anggota Lemhannas RI dan peserta PPRA XLIII di Lapangan Tennis Lemhannas RI

**D**alam rangkaian Idul Fitri 1 Syawal 1430 H, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, SH beserta warga Lemhannas RI melaksanakan Halal bi Halal yang merupakan tradisi yang perlu dilestarikan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai moral yaitu saling maaf memaafkan terhadap kesalahan diantara sesama, dan juga dalam upaya meningkatkan keharmonisan sebagai warga Lemhannas RI, karena dengan keharmonisan, maka berbagai tugas seberat apapun, Insya Allah akan dapat dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa: Semangat kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan yang kokoh dan kuat, yang dibangun diatas dasar-dasar ajaran dan nilai-nilai keagamaan, sangat dibutuhkan dalam organisasi yang dinamis seperti Lemhannas, karena hal tersebut dapat mendorong terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik dan sangat diperlukan dalam meraih keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, karena sebagai abdi dan aparatur negara, dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi. Unsur-unsur moral yang tinggi itu adalah ketaqwaan, kejujuran dan keikhlasan serta keyakinan akan kebenaran tugas yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan ketaqwaan itu sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk memelihara dan menjaga

serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, dan kejujuran serta keikhlasan adalah kesadaran atau motivasi yang terdapat didalam hati, sehingga dalam melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan dan kemajuan lembaga serta kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam konteks peran, fungsi dan tugas pokok lembaga semuanya harus dijalankan berbasis pada moralitas yang tinggi, rela berkorban dan bersatu untuk mencapai tujuan serta senantiasa harus optimis untuk maju, karena pertarungan eksistensi bangsa, sebagian berada di tangan Lemhannas RI.



## STUDY STRATEGIS LUAR NEGERI PPRA XLIII KEBEBERAPA NEGARA ASEAN TAHUN 2009



Tanggal 10 Oktober 2009 sebagian peserta PPRA XLIII kelompok D Lemhannas RI berphoto bersama sebelum menuju Bandara Soekarno - Hatta untuk melaksanakan SSLN dengan tujuan Vietnam

Sebagai bagian dari program Pendidikan Reguler Angkatan XLIII para peserta melaksanakan salah satu kegiatan Study Strategi Luar Negeri (SSLN) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok ke 5 (lima) pada negara tujuan yaitu Vietnam, Philipina, China, Brunai Darussalam dan Australia. Topik SSLN kali ini adalah : "Membangun Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara Vietnam, Philipina, China, Brunai Darussalam, Australia guna meningkatkan pembangunan ekonomi dalam rangka Ketahanan Nasional". Sasaran kegiatan adalah untuk: memperoleh masukan data dan informasi obyek-obyek yang ditinjau dari aspek kesejahteraan dan hankam, meliputi : latar belakang, prospek di masa mendatang, motivasi/Aspirasi masyarakat realisasi pelaksanaan pembangunan, dampak yang timbul dan hal-hal penting lainnya.

## KEGIATAN INSPEKTORAT LEMHANNAS RI

Pada tgl, 6 Oktober 2009 bertempat di ruang kerja Dewan Pengarah Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Alpiner Sinaga memaparkan program kerja Inspektorat Lemhannas RI tahun 2010, yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara dengan sasaran tersusun dan terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan pelaksanaan program, Sumber Daya Manusia dan peningkatan kapasitas organisasi.

Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatur Negara (Internal) bertujuan untuk terselenggaranya audit internal yang memberi masukan kepada pimpinan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyusunan / perumusan sistem dan prosedur teknis.
2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan.
3. Pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut.
4. Evaluasi / laporan kegiatan.
5. Rapat-rapat koordinasi / kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi.
6. Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
7. Pengkajian dan penyusunan peraturan-peraturan.



Prof. Drs. H.A. Malik Fajar memimpin rapat internal Dewan Pengarah tentang Program Kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2010



Inspektur Lemhannas RI sedang memaparkan Program Kerja Inspektorat Lemhannas RI Tahun Anggaran 2010

## SERTIJAB DAN PELANTIKAN PEJABAT ESELON II, III, DAN IV LEMHANNAS RI TANGGAL 12 OKTOBER 2009



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH sedang membacakan Sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik pada tanggal 12 Oktober 2009

Pada kesempatan serah terima jabatan, pelantikan, penyempahan dan pelepasan pejabat eselon II, III dan IV, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH menyampaikan amanat bahwa alih tugas dan jabatan di lingkungan Lemhannas RI, merupakan kegiatan dari proses pembinaan organisasi dan pembinaan personel, guna meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan manajerial serta kepemimpinan saudara-saudara yang mendapatkan kesempatan menjalankan alih tugas dan jabatan tersebut. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, dan didukung dengan kepemimpinan dan manajerial yang baik, maka akan tumbuh dan berkembang kinerja organisasi yang baik pula, yang pada gilirannya akan menjamin tercapainya pelaksanaan tugas pokok. Prinsip yang demikian ini hendaknya menjadi acuan dalam mendinamisasikan suatu organisasi, sehingga roda organisasi bergerak dan berjalan ke arah tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya gubernur menyatakan, bahwa sebagian masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia tidak mungkin lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, suatu dinamika yang selalu diikuti dengan perubahan-perubahan yang

mempengaruhi langsung pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, seperti halnya isu global yang masih segar dalam ingatan kita yaitu tentang demokratisasi, lingkungan hidup, hak azasi manusia dan terorisme. Isu global tersebut telah mempengaruhi dan mampu merubah tatanan kehidupan bangsa Indonesia, salah satu contoh seperti isu demokratisasi, telah mengantarkan negara yang kita cintai ini, menjadi negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India, meskipun dalam penerapannya masih menyebabkan timbulnya benturan-benturan yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian lingkungan regional berkembang masalah-masalah konflik perbatasan, hak paten, instabilitas beberapa negara di kawasan dan lain sebagainya. Hal ini kalau tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana sesuai hukum yang berlaku, maka akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan nasional, terutama masalah ekonomi, politik dan keamanan.

Pada lingkup nasional, kita masih dihadapkan pada permasalahan internal baik di bidang ideologi, politik, sosial budaya maupun bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan dibidang ekonomi masih terus diadakan perbaikan-perbaikan, namun di sisi lain berbagai musibah nasional berupa bencana alam telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang telah memporak-porandakan banyak bangunan tempat tinggal, perkantoran dan sarana pemerintahan lainnya, serta menelan banyak korban jiwa.

Bencana alam tersebut tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, seperti telah terjadi di Sumatra Barat dan sekitarnya yang sampai sekarang masih belum selesai penanganannya. Gubernur pada kesempatan tersebut atas nama lembaga dan pribadi, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada warga masyarakat yang terkena musibah dan menghimbau kepada segenap keluarga besar Lemhannas RI, agar peduli dan membantu memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa tersebut melalui tim yang telah dibentuk oleh Lemhannas RI dan berkoordinasi dengan IKAL.



Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, SH sedang menyematkan tanda Jabatan kepada salah satu perwakilan pejabat Lemhannas RI dalam acara Sertijab dan Pelantikan pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan Lemhannas RI

**Pengarah :** DR. Ardi Partadinata, MH, M.Si. **Penanggung Jawab :** Brigjen TNI Kusworo,  
**Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, MH, M.Sc **Penyunting/Editor :** Djoko Saksono,  
Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, MM, Mayor Inf. Risnal SH. MA.

**Redaktur Pelaksana :** Linda Purnamasari, Mayor Caj (K) Rita Ratnayu

**Desain Grafis & Fotografer :** Arief Musadayan, Arianto, Hendrik Garang, **Sekretariat :** Syafrizal, Gatot

**Alamat Redaksi :** Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926